



Terbit online pada laman web jurnal : jkaa.bunghatta.ac.id

JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING

| ISSN (print) : 1907-2473 | E-ISSN 2721-8457 |



ANALISIS PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL, AKUNTABILITAS PUBLIK, TRANSPARANSI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Ismiati, Jumirin Asyikin*

STIE Indonesia Banjarmasin

Corresponding author: jumirin@stiei-kayutangi-bjm.ac.id

Abstract

This study aims to empirically test the functional supervision, public accountability, transparency and improvement of public services that affect the dependent variable of local government performance at the PUPR Office of Batola Regency, either partially or simultaneously. The design in this study is a quantitative comparative causal research. The population in this study were all employees at the PUPR Office of Batola Regency using purposive sampling method. Data collection techniques used through questionnaires. Testing the research hypothesis using multiple regression analysis. The results of this study indicate that partially functional supervision has a positive and significant effect on local government performance. For public accountability does not affect the performance of local governments with a negative direction of influence. Transparency also has no effect on local government performance and has a positive direction of influence. And to improve public services has a positive and significant effect on the performance of local governments.

Keywords: *functional supervision, public accountability, transparency, improvement of public services and local government performance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengawasan fungsional, akuntabilitas publik, transparansi dan peningkatan pelayanan publik mempengaruhi variabel dependen kinerja pemerintah daerah pada Dinas PUPR Kabupaten Batola, baik secara parsial dan simultan. Desain dalam penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Batola dengan teknik metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kuesioner. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Untuk akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan arah pengaruh yang negatif. Transparansi juga tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dan memiliki arah pengaruh yang positif. Dan untuk peningkatan pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata Kunci: *pengawasan fungsional, akuntabilitas publik, transparansi, peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah*

Informasi Artikel

Diterima : 16 Juli 2021

Review Akhir : 11 November 2021

Diterbitkan online : November 2021

PENDAHULUAN

Perubahan dalam paradigma ini seperti diciptakannya otonomi daerah dalam undang-undang 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah serta yang memimpin terlaksananya urusan pemerintah yang menjadi wewenang dari daerah otonom dimana hal tersebut bersifat luas, nyata dan bertanggung jawab. Selain itu, otonomi daerah juga menjalankan pelaksanaan *good governance*, dimana pemerintah daerah diwajibkan dalam penerapan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, serta akuntabilitas dan transparansi sebagai peranan yang penting dalam terwujudnya pemerintahan yang baik dalam sebuah instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kabupaten Batola merupakan daerah yang dianggap strategis karena menjadi daerah perlintasan antar provinsi antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah sehingga kinerja pemerintah daerah khususnya Dinas PUPR memerlukan perkembangan dalam segala aspek kerjanya agar dapat melaksanakan seluruh sasaran dan capaian yang telah dirancang tanpa melanggar peraturan yang telah berlaku. Hal ini dilakukan agar seluruh kinerja yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat tanpa ada kesalahan pemahaman antara pemerintah daerah terkait dengan masyarakat sehingga dapat dipercaya oleh semua pihak dan dapat menampilkan sisi pemerintahan yang dianggap sebagai *good governance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Harvianda, (2016), Putra, (2018), Meme dan Subardjo, (2019) melaksanakan tujuan yang telah dirancang dan diterapkan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan lokasi penelitian yang diambil yaitu pada Dinas PUPR Kabupaten Batola dan populasi yang diambil yaitu pegawai Dinas PUPR Kabupaten Batola.

Berdasarkan hasil diskusi dari beberapa penelitian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengawasan fungsional, akuntabilitas publik, transparansi dan peningkatan pelayanan publik mempengaruhi variabel dependen kinerja pemerintah daerah pada Dinas PUPR Kabupaten Batola, baik secara parsial dan simultan.

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah kontrak yang melibatkan satu atau lebih agen dalam upaya pelaksanaan beberapa pelayanan dengan mengadakan pendelegasian wewenang mengenai pengambilan keputusan kepada agen (Jensen, 1976). Teori agensi bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan hubungan kontrak antar pihak sebagai cara untuk meminimalisasikan biaya yang menjadi dampak dari adanya informasi yang tidak seimbang dari ketidakjelasan suatu kondisi, sehingga hubungan antara teori agensi dengan pemerintah yang demokrasi yaitu hubungan mengenai keagenan pada pemerintah sebagai pihak yg menyediakan informasi keuangan dan masyarakat sebagai pihak yang menggunakan informasi keuangan pemerintah (Meme dan Subardjo, 2019).

Pengertian Kinerja

Mahmudi, (2005) menjelaskan bahwa kinerja dapat diartikan seperti sebuah konstruksi yang memiliki sifat multidimensional dalam pengukurannya dan bergantung pada faktor yang dapat mempengaruhinya serta membentuk hal-hal baru seperti faktor kepemimpinan, faktor sistem, faktor situasional, faktor individu, dan faktor tim. Bahwa pengukuran kinerja adalah merupakan sebuah metode atau cara yang digunakan sebagai alat untuk mencatat serta menilai hasil dari suatu kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat disimpulkan

bahwa kemajuan organisasi dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Meme dan Subardjo, 2019).

Perencanaan kinerja

Perencanaan kinerja atau manajemen kinerja adalah suatu kegiatan merancang program yang akan dijalankan dan memiliki hubungan yang berkesinambungan. Hendi et al., (2019) menjelaskan bahwa hasil kerja dari perencanaan yang telah diprogramkan harus berhubungan terhadap tugas pokok suatu jabatan yang dijadikan sebagai tanggung jawab pegawai.

Penilaian kinerja

Penilaian kinerja merupakan proses menilai maupun mengevaluasi seluruh hasil atas kemampuan dari suatu organisasi mengenai perkembangan dalam mencapai target yang telah dibuat dan disetujui. Penilaian kinerja merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan oleh setiap organisasi dalam upaya peningkatan kinerja setiap pegawai.

Indikator kinerja

Bastian, (2001:337) dalam Harvianda, (2014) menjelaskan bahwa indikator kinerja merupakan standar dari kuantitatif dan kualitatif tentang gambaran kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketetapan yang telah dirumuskan. Indikator kinerja harus dapat memberikan bukti melalui perhitungan yang diukur serta dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai tingkatan suatu kinerja. Penggunaan indikator kinerja merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui mengenai kejelasan suatu program kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sudah berjalan secara efektif dan efisien atau tidak.

Pengertian pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh seperangkat aparat pengawasan secara fungsional baik dari internal pemerintah maupun dari eksternal pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan atas tugas umum dari pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rancangan program dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sumarsono, 2010).

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah kepada publik mengenai semua kegiatan yang telah dilakukan. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban dari pemegang amanah (*agent*) agar dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang berhak dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Transparansi publik

Transparansi publik adalah keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat berdasarkan bahwa masyarakat memiliki haknya dalam mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya yang dilaksanakannya serta ketaatannya pada peraturan yang berlaku (Putra et al., 2016).

Tabel 1. Reviu Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan
1.	Harvianda (2014)	Variabel Independen: 1. Pengawasan Fungsional 2. Akuntabilitas Publik Variabel Dependen: Kinerja Pemerintah Daerah	1. Pengawasan fungsional secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah (studi empiris pada SKPD Provinsi Riau). 2. Akuntabilitas publik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah (studi empiris pada SKPD Provinsi Riau).	Persamaan: Menggunakan variabel independen dan variabel dependen yang sama. Perbedaan: Menambahkan variabel transparansi dan peningkatan pelayanan publik sebagai variabel independen dan lokasi penelitian yang dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala.
2.	Putra, (2018)	Variabel Independen : 1. Pengawasan fungsional 2. Akuntabilitas Publik 3. Peningkatan Pelayanan Publik Variabel Dependen: Kinerja Pemerintah Daerah	1. Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik, dan Peningkatan Pelayanan Publik secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. 2. Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik, dan Peningkatan Pelayanan Publik secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pemerintah di Pemda Jambi	Persamaan: Menggunakan variabel independen dan variabel dependen yang sama. Perbedaan: Menambahkan variabel transparansi sebagai variabel independen dan lokasi penelitian yang dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala.
3.	Djiloy, (2016)	Variabel Independen : 1. Pengawasan Intern 2. Perencanaan 3. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Variabel Dependen : Kinerja Pemerintah Daerah	1. Pengawasan intern mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. 2. Perencanaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. 3. Pelaksanaan system akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.	Persamaan: Menggunakan variabel kinerja pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Perbedaan: Menggunakan variabel pengawasan fungsional, akuntabilitas publik, transparansi, dan peningkatan pelayanan publik sebagai variabel independen.
4.	Novatiani et al., (2019)	Variabel Independen : 1. Transparansi 2. Akuntabilitas	1. Transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD Bandung Barat. 2. Akuntabilitas berpengaruh	Persamaan: Menggunakan variabel independen dan variabel dependen yang sama. Perbedaan: Menggunakan

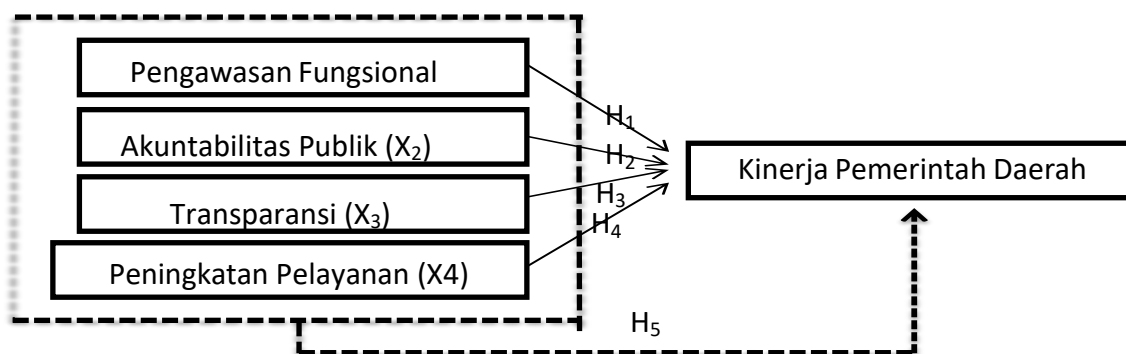
	Variabel Dependen : Kinerja Instansi Pemerintah	terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada SKPD Bandung Barat.	variabel pengawasan fungsional dan peningkatan pelayanan publik sebagai variabel independen.
5. Asrini, (2017)	Variabel Independen: 1. Akuntabilitas Publik 2. Kejelasan Sasaran Anggaran 3. Partisipasi Penyusunan Anggaran Variabel Dependen: Kinerja SKPD	1. Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD di Pemerintah Kota Palu. 2. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD di Pemerintah Kota Palu. 3. Penyusunan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD di Pem. Palu	Persamaan: Menggunakan variabel akuntabilitas publik sebagai variabel independen. Perbedaan: Menggunakan variabel pengawasan fungsional, transparansi dan peningkatan pelayanan publik sebagai variabel independen dan kinerja pemerintah daerah sebagai variabel dependen.
6. Meme dan Subardjo, (2019)	Variabel Independen: 1. Pengawasan Fungsional 2. Transparansi 3. Akuntabilitas 4. Pelayanan Publik Variabel Dependen: Kinerja Pemerintah Daerah	1. Pengawasan Fungsional berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Nagekeo. 2. Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Nagekeo. 3. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Nagekeo. 4. Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Nagekeo.	Persamaan: Menggunakan variabel independen dan variabel dependen yang sama. Perbedaan: Lokasi penelitian yang dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala.
7. Mete dan Amanah, (2020)	Variabel independen: 1. Pengawasan Fungsional 2. Transparansi Publik 3. Akuntabilitas Publik	1. Pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Kab. Alor. 2. Transparansi publik tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Alor. 3. Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Kab. Alor.	Persamaan: Menggunakan variabel independen dan variabel dependen yang sama. Perbedaan: Menambahkan variabel peningkatan pelayanan publik sebagai variabel independen dan lokasi penelitian yang berbeda.

Sumber: diolah penulis, 2020.

Peningkatan pelayanan publik

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang diadakan langsung dan berlanjut pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat Moenir, (2008), hal ini berkaitan dengan bahwa pemerintah adalah sebagai satu- satunya yang memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Gambaran mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah penulis, 2020

Keterangan: Secara Parsial : —————>
 Secara Simultan: - - - - ->

Perumusan Hipotesis

Harvianda, (2014) menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan juga didukung oleh penelitian lain Putra, (2018) serta Meme dan Subardjo, (2019) bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : Pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Harvianda, (2014) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah, didukung dalam penelitian lain Putra, (2018) yang memberi penjelasan bahwa akuntabilitas publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah serta dalam Asrini, (2017) dan Meme dan Subardjo, (2019) memiliki pendapat yang sama bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

H2 : Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Novatiani et al., (2019) yang menyatakan semakin tinggi transparansi yang diterapkan pada aparat pemerintahan maka akan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini juga didukung N. Putra et al., (2016) dan Meme dan Subardjo, (2019) yang menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah secara parsial dan simultan. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H3 : Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang terlaksana dengan rutin dan berkelanjutan yang mencakup kehidupan seluruh masyarakat (Moenir, 2008). Oleh karena itu, hal ini memberikan makna bahwa pelayanan publik memiliki hubungan terhadap kepuasan batin seseorang yang menerima pelayanan dan apabila suatu pelayanan ditingkatkan maka akan berpengaruh positif terhadap penerima pelayanan.

Putra, (2018), Sadjarto, (2014) dan Meme dan Subardjo, (2019) memiliki kesamaan dalam pernyataan mereka yang menyatakan bahwa pelayanan publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

H4: Peningkatan pelayanan publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Novatiani et al., (2019), Djiloy, (2016) dan Putra et al, (2016) yang menyatakan bahwa dengan adanya pengawasan publik, akuntabilitas publik, transparansi dan peningkatan pelayanan publik akan menjadikan kinerja pemerintah daerah semakin membaik. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H5: Pengawasan fungsional, akuntabilitas publik, transparansi dan peningkatan pelayanan publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Variabel Dependen

Sehingga ukuran indikator variabel yang digunakan yaitu kegiatan pemerintah dalam menjalankan fungsinya dan mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi dalam menjalankan segala aktivitas pemerintahan dari penelitian Harvianda, (2014) dan Putra, (2018) yang diukur dengan skala *likert*.

Variabel Independen

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengawasan fungsional, akuntabilitas publik, transparansi, dan peningkatan pelayanan publik. Adapun definisi operasional dari empat variabel tersebut yaitu sebagai berikut.

a. Pengawasan Fungsional (X_1)

Pengukuran variabel ini menggunakan instrument yang diadopsi dari penelitian Harvianda, (2014) dan Putra, (2018) yang diukur dengan skala *likert*.

b. Akuntabilitas Publik (X_2)

Ukuran indikator variabel yang digunakan yaitu bagaimana cara melakukan evaluasi dari pertanggungjawaban oleh pihak pemegang amanah, penyajian laporan keuangan, dan pengungkapan seluruh aktivitas dalam pemerintahan. Pengukuran variabel ini menggunakan instrument yang diadopsi dari penelitian(Harvianda et al., 2014) dan (Putra, 2018) yang diukur dengan skala *likert*.

c. Transparansi (X_3)

Ukuran indikator variabel yang digunakan yaitu keberadaan kerangka kerja hukum dalam transparansi, akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, audit yang bersifat independen dan efektif, serta keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran (Andrianto, 2017). Variabel ini menggunakan instrument yang diadopsi dari penelitian terdahulu yang diukur dengan skala *likert*.

d. Peningkatan Pelayanan Publik (X_4)

Ukuran indikator variabel yang digunakan yaitu tentang cara mengevaluasi pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan baik. Variabel ini menggunakan instrument yang diukur dengan skala *likert* sebagaimana yang diatur dalam KepmenPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 (Putra, 2018).

Berdasarkan dari instrument yang digunakan dalam pernyataan seperti yang disusun dalam poin di atas beracuan pada skala *likert 5 point*.

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam pengembangan penelitian dengan memberikan gambaran mengenai suatu organisasi yang akan dijadikan sampel dan mengidentifikasi hubungan antar variabel yang akan diuji pada setiap hipotesis. Statistik deskriptif terdiri dari mean, standar deviasi, variance, maksimum dan minimum.

Uji Validitas

Uji validitas adalah alat yang mengukur validitas suatu kuesioner. Kuesioner dapat

dikatakan *valid* jika pertanyaan pada kuesioner mampu menjelaskan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut hasil dan apabila r hitung $>$ r tabel dan hasil dari r hitung memiliki nilai positif (Ghozali, 2016:52)

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat dalam mengukur kuesioner yang menjadi indikator dari suatu variabel. Kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban dari seseorang mengenai pernyataan adalah stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47). Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan alat bantu program SPSS.

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah bertujuan untuk menguji keberadaan variabel residual yang mempunyai distribusi normal dalam model regresi (Ghozali, 2016:154). Menurut Mehta dan Patel, (2011) dan Ghozali, (2018) penentuan nilai uji *kolmogorov-smirnov* dapat digunakan berdasarkan padatiga pendekatan nilai yaitu *asympt.sig*, *monte carlo.sig*, dan *exact.sig*, apabila salah satu nilai pada pendekatan tidak memberikan hasil data yang normal maka dapat menggunakan pendekatan yang lain agar dapat menghasilkan distribusi data dengan normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah bertujuan menguji keberadaan hubungan korelasi antar variabel bebas (independen) dalam suatu regresi, uji multikolinieritas dapat mendeteksi keberadaan multikolinieritas dalam suatu model regresi yaitu dengan melihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)*. Adapun nilai *cut off* yang umum dipakai dalam menunjukkan adanya multikolinieritas adalah dengan nilai *tolerance* $>$ 0,1 atau sama dengan nilai $VIF < 10$, sehingga suatu model regresi dianggap baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel bebas atau tidak terjadimultikolinieritas (Ghozali, 2016).

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah digunakan untuk menguji keberadaan mengenai suatu kejadian perbedaan antara *variance residual* dari satu pengamatan dengan pengamatan yang lain, maka hal ini mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya).

Analisis Regresi Berganda

Sugiyono, (2012) menjelaskan bahwa regresi linier berganda dapat dilakukan dengan jumlah minimum variabel independennya dua. Persamaan regresi linier berganda ditetapkan yaitu sebagai berikut (Siregar, 2013): $Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 \dots + b_nX_n$. Dimana Y = Variabel terikat (dependen), α = Koefisien konstanta, b = Koefisien regresi, X_1 = Variabel bebas pertama X_2 = Variabel bebas kedua = Variabel bebas ketiga X_n = Variabel bebas ke n.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu pengukuran mengenai koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui persentase besar kecilnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. R^2 memiliki nilai antara nol dengan satu.. Adapun rumus koefisien determinasi yaitu $Kd = r^2 \times 100\%$, dimana Kd = perubahan ukuran variabel terikat = korelasi *product moment*

Uji Signifikansi Simultan

Pengujian uji F dilakukan dengan dua cara yaitu dengan memperhatikan tingkat signifikansi atau dengan membandingkan antara pengujian dengan tingkat signifikansi pada tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 70 (100%) responden yang dibagikan melalui bantuan Sekretaris dan Pegawai. Proses perizinan, penyebaran dan pengisian kuesioner ini dilaksanakan mulai tanggal 24 Oktober 2020-26 Februari 2021. Kuesioner kembali sebanyak 58 (82,80%) kuesioner sisanya sebanyak 12 (17,20%) tidak memenuhi syarat penelitian.

Hasil Analisis

Pengawasan Fungsional

Variabel pengawasan fungsional, jawaban minimum responden 3,00 dan maksimum 5,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) 4,0862 dan nilai standar deviasi 0,46958. Nilai minimum 3,00 menggambarkan seluruh responden memberikan penilaian terendah pada pengawasan fungsional yang termasuk dalam interval (2,61-3,40) dengan kategori jawaban netral. Nilai maksimum 5,00 menggambarkan bahwa seluruh responden memberikan penilaian tertinggi pada pengawasan fungsional yang termasuk dalam interval (4,21-5,00) dengan kategori jawaban sangat setuju. Perbandingan antara nilai rata-rata (*mean*) 4,0862 dengan nilai maksimum 5,00. Sedangkan, nilai standar deviasi 0,46958 menggambarkan bahwa ukuran penyebaran data variabel pengawasan fungsional 0,46958.

Akuntabilitas Publik

Variabel akuntabilitas publik, jawaban minimum responden 3,00 dan maksimum 5,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) 4,1034 dan nilai standar deviasi 0,55218. Nilai minimum 3,00 menggambarkan seluruh responden memberikan penilaian terendah pada akuntabilitas publik yang termasuk dalam interval (2,61-3,40) dengan kategori jawaban netral. Nilai maksimum 5,00 menggambarkan bahwa seluruh responden memberikan penilaian tertinggi pada akuntabilitas publik yang termasuk dalam interval (4,21-5,00) dengan kategori jawaban sangat setuju. Perbandingan antara nilai rata-rata (*mean*) 4,1034 dengan nilai maksimum 5,00. Sedangkan, nilai standar deviasi 0,55218 menggambarkan bahwa ukuran penyebaran data variabel akuntabilitas publik 0,55218.

Transparansi

Variabel transparansi, jawaban minimum responden 3,00 dan maksimum 5,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) 3,9138 dan nilai standar deviasi 0,60072. Nilai minimum 3,00 menggambarkan seluruh responden memberikan penilaian terendah pada transparansi yang termasuk dalam interval (2,61-3,40) dengan kategori jawaban netral. Nilai maksimum 5,00 menggambarkan bahwa seluruh responden memberikan penilaian tertinggi pada transparansi yang termasuk dalam interval (4,21-5,00) dengan kategori jawaban sangat setuju. Perbandingan antara nilai rata-rata (*mean*) 3,9138 dengan nilai maksimum 5,00. Sedangkan, nilai standar deviasi 0,60072 menggambarkan bahwa ukuran penyebaran data variabel transparansi 0,60072.

Peningkatan Pelayanan Publik

Variabel peningkatan pelayanan publik, jawaban minimum responden 3,00 dan maksimum 5,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) 4,0345 dan nilai standar deviasi 0,52867. Nilai minimum 3,00 menggambarkan seluruh responden memberikan penilaian terendah pada peningkatan pelayanan publik yang termasuk dalam interval (2,61-3,40) dengan kategori jawaban netral. Nilai maksimum 5,00 menggambarkan bahwa seluruh responden memberikan penilaian tertinggi pada peningkatan pelayanan publik yang termasuk dalam interval (4,21-5,00) dengan kategori jawaban sangat setuju. Perbandingan antara nilai rata-rata (*mean*) 4,0345 dengan nilai maksimum 5,00. Sedangkan, nilai standar deviasi 0,52867 menggambarkan ukuran penyebaran data variabel peningkatan pelayanan publik 0,52867.

Kinerja Pemerintah Daerah

Variabel kinerja pemerintah daerah, jawaban minimum responden 3,00 dan maksimum 5,00 dengan nilai rata-rata (*mean*) 4,0517 dan nilai standar deviasi 0,57499. Nilai minimum 3,00 menggambarkan seluruh responden memberikan penilaian terendah pada kinerja pemerintah daerah yang termasuk dalam interval (2,61-3,40) dengan kategori jawaban netral. Nilai maksimum 5,00 menggambarkan seluruh responden memberikan penilaian tertinggi pada kinerja pemerintah daerah termasuk interval (4,21-5,00) dengan kategori jawaban sangat setuju. Sedangkan, nilai standar deviasi 0,57499 menggambarkan bahwa ukuran penyebaran data variabel kinerja pemerintah daerah 0,57499.

Pengujian Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Penelitian ini 58 responden, sehingga diperoleh nilai $(df)=58-2$ dengan hasil nilai dari df yaitu 56 maka diperoleh angka r tabel untuk uji validitas pada penelitian ini dengan taraf signifikan 1% 0,3375. Pengujian validitas instrumen penelitian atas variabel pengawasan fungsional, akuntabilitas publik, transparansi, peningkatan pelayanan publik, dan kinerja pemerintah daerah, semua variabel penelitian dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Hasil pengujian menunjukkan, variabel pengawasan fungsional memiliki nilai *cronbach alpha* 0,887 lebih besar 0,60, akuntabilitas 0,816 lebih besar 0,60, transparansi 0,875 lebih besar dari 0,60, peningkatan pelayanan publik 0,892 lebih besar 0,60 dan kinerja pemerintah daerah 0,870 lebih besar dari 0,60 sehingga seluruh variabel dapat dikatakan reliabel dan layak digunakan sebagai penelitian.

Uji Normalitas

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai *p-value* dari Asymp.Sig. (2-tailed) yaitu 0,020 yang berarti nilai signifikan $< 0,05$ sehingga data tidak berdistribusi dengan normal dengan jumlah data 58 dapat disimpulkan tidak cocok jika menggunakan pendekatan *asymptotic only* karena pendekatan ini akan tidak berdistribusi dengan normal apabila pengukuran dengan besaran data yang kecil. Melakukan uji ini dengan pendekatan *monte carlo* dimana nilai *p-value* monte carlo.sig 0,282 $> 0,05$ sehingga data dapat dikatakan telah berdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$) dan memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 ($tol > 0,1$), dimana dari hasil output SPSS tersebut menunjukkan bahwa pengawasan fungsional (X_1) memiliki nilai *tolerance* 0,463 $> 0,1$ dengan nilai VIF 2,161 < 10 , akuntabilitas publik (X_2) memiliki nilai *tolerance* 0,339 $> 0,1$ dengan nilai VIF 2,954 < 10 , transparansi (X_3) memiliki nilai *tolerance* 0,383 $> 0,1$ dengan nilai VIF 2,612, dan peningkatan pelayanan publik (X_4) memiliki nilai *tolerance* 0,532 $> 0,1$ dengan nilai VIF 1,879 < 10 .

Uji Heteroskedastisitas

Untuk memperkuat hasil pengujian ini maka peneliti juga menggunakan uji glejser untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil hitung menunjukkan secara keseluruhan bahwa nilai R 0,689. Sedangkan nilai *Adjust R Square* 0,435 menunjukkan bahwa variabel kinerja pemerintah daerah mampu dijelaskan oleh variabel independen 43,5% dan selebihnya 56,5% dapat dijelaskan

oleh faktor-faktor lain.

Uji Statistik t

Tabel 2. Uji Hipotesis Parsial t

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1 (Constant)	6.656	3.605		1.846	.070
Pengawasan Fungsional (X1)	.306	.089	.503	3.436	.001
Akuntabilitas Publik (X2)	-.158	.098	-.275	-1.609	.113
Transparansi (X3)	.165	.112	.237	1.472	.147
Peningkatan Pelayanan Publik (X4)	.292	.137	.291	2.135	.037

Sumber: Data primer diolah, 2021

Dari hasil perhitungan tersebut maka diperoleh nilai t- tabel berdasarkan pada tabel 2 distribusi t yaitu 1,672, sehingga pengujian hipotesis mengenai variabel independen terhadap kinerja pemerintah daerah dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengujian variabel X₁, nilai signifikan (0,001 < 0,05) dan nilai t-hitung > t-tabel (3,436 > 1,672), H₁ diterima, pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap kinerja pemda.
2. Pengujian variabel X₂, nilai signifikan (0,113 > 0,05) dan nilai t-hitung < t-tabel (-1,609 < 1,672), H₂ ditolak, akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.
3. Pengujian variabel X₃, nilai signifikan (0,147 > 0,05) dan nilai t-hitung < t-tabel (1,472 < 1,672), jadi H₃ ditolak, transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.
4. Pengujian variabel X₄, memiliki nilai signifikan (0,037 < 0,05) dan nilai t-hitung > t-tabel (2,135 > 1,672), jadi H₄ diterima, peningkatan pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemda.

Uji Simultan

Tabel 3. Uji Simultan F

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1 (Constant)	6.656	3.605		1.846	.070
Pengawasan Fungsional (X1)	.306	.089	.503	3.436	.001
Akuntabilitas Publik (X2)	-.158	.098	-.275	-1.609	.113
Transparansi (X3)	.165	.112	.237	1.472	.147
Peningkatan Pelayanan Publik (X4)	.292	.137	.291	2.135	.037

Sumber: Data primer diolah, 2021

Dalam penelitian ini, hasil dari uji F menunjukkan nilai signifikan (0,000 < 0,05) dan f-hitung > f-tabel (11,970 > 2,54), jadi H₅ diterima sehingga pengawasan fungsional, akuntabilitas

publik, transparansi, dan peningkatan pelayanan publik secara bersama-sama) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Harvianda, (2014), Putra, (2018), serta Meme dan Subardjo, (2019). Bahwa semakin meningkatnya pelaksanaan pengawasan fungsional di dalam organisasi pemerintahan maka akan berpengaruh pada semakin membaiknya kinerja pemerintah tersebut, karena pengawasan fungsional merupakan suatu tindakan dari pemerintah dalam menjamin suatu pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar

Berdasarkan pada hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas PUPR Kabupaten Batola. Didasari oleh teori keagenan bahwa pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principle* harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi segala kegiatan pemerintahan sehinggamenghasilkan dampak yang baik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan hasilakuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah denganberdasarkan pada nilai t-hitung yang lebih kecil dari t-tabel dan signifikan yang ditunjukkan pada nilai signifikansi yang lebih besar dari nilai alpha, maka hipotesis kedua ditolak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Harvianda (2014), Putra (2018), serta Meme dan Subardjo (2019). Menurut Putra (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena akuntabilitas menjadi prinsip tanggung jawab mengenai seluruh perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga dalam penilaian kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui pelaporan akuntabilitas baik itu secara manajerial maupun kinerja.

Berdasarkan pada hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas PUPR Kabupaten Batola. Berdasarkan dari indikator kinerja mengenai pencapaian kegiatan yang dihasilkan dapat berupa pertanggungjawaban dari organisasi pemerintah yang dapat dijadikan sebagai bentuk penilaian mengenai baik atau buruknya akuntabilitas akan berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin buruknya akuntabilitas dalam organisasi pemerintah maka penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah juga akan semakin buruk, begitupun juga untuk sebaliknya.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan hasil transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan berdasarkan pada nilai t-hitung yang lebih kecil dari t-tabel dan signifikan yang ditunjukkan pada nilai signifikansi yang lebih besar dari nilai alpha, maka hipotesis ketiga ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena dari transparansi memberikan ketersediaan dan keterbukaan mengenai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan indikator kinerja mengenai gambaran dalam mengolah segala hal yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat tercapai sehingga akan memberikan pengaruh yang baik pada kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas PUPR Kabupaten Batola. Hal ini dikarenakan oleh sebagian dari jawaban responden melalui kuesioner yang dapat disimpulkan bahwa transparansi mengenai ketersediaan informasi tentang kinerja anggaran yang masih dianggap sulit

untuk diakses oleh publik dan masih terdapat ketidak tepatan waktu dalam hal informasi mengenai pelaporan pertanggungjawaban. Pada dasarnya transparansi menjadi syarat dalam terbentuknya pemerintahan yang baik, karena jika transparansi tidak memberikan akses terhadap segala informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan maka penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah belum dapat dianggap baik bagi publik.

Pengaruh Peningkatan Pelayanan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan hasil pengawasan fungsional berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah berdasarkan pada nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel dan signifikan yang ditunjukkan pada nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai alpha, maka hipotesis pertama diterima. Keberadaan koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan hubungan peningkatan pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah yang bermakna bahwa semakin meningkatnya perbaikan pelayanan untuk publik maka kinerja dari pemerintah daerah akan dianggap semakin baik. Hal ini karena pelayanan publik merupakan aktivitas pemerintahan yang diadakan secara terus-menerus kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Putra (2018) serta Meme dan Subardjo (2019). Putra (2018) menyatakan bahwa peningkatan pelayanan publik memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena baik atau buruknya pelaksanaan pemerintahan dalam memberikan pelayanan akansangat mempengaruhi kinerja pemerintah karena mereka dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada publik. Pelaksanaan pelayanan kepada publik berdasarkan kepada indikator kinerja mengenai pengaruh dan dampak yang didapatkan dari pelayanan yang telah diberikan. Hipotesis keempat dapat disimpulkan bahwa peningkatan pelayanan publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Dinas PUPR Kabupaten Batola.

Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik, Transparansi, dan Peningkatan Pelayanan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian memiliki arti bahwa dengan adanya pengawasan fungsional, akuntabilitas publik, transparansi dan peningkatan pelayanan publik akan menjadikan kinerja pemerintah daerah semakin membaik, karena hal tersebut menjadi suatu keharusan dalam berjalannya aktivitas pemerintahan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Novatiani et al. (2019), Putra (2018) serta Meme dan Subardjo (2019). Novatiani et al. (2019) menyatakan bahwa secara simultan transparansi dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena pelaksanaan pengawasan, akuntabilitas, transparansi dan peningkatan dalam memberikan pelayanan publik menjadi keharusan untuk dilaksanakan dengan tujuan agar mengurangi tindak penyalahgunaan maupun penyelewengan dalam aktivitas pemerintahan karena adanya pengawasan, akuntabilitas, keterbukaan mengenai informasi dan upaya dalam pelayanan kepada masyarakat akan memiliki dampak yang baik pada kinerja pemerintah.

Berdasarkan hipotesis kelima dapat disimpulkan bahwa pengawasan fungsional, akuntabilitas publik, transparansi dan peningkatan pelayanan publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas PUPR Kabupaten Batola.

SIMPULAN

Hasil penelitian didapatkan bukti empiris, secara parsial pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas PUPR Kabupaten Batola. Kemudian hasil penelitian didapatkan bukti empiris bahwa secara parsial

akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas PUPR Kabupaten Batola dengan arah pengaruh yang negatif.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bukti empiris bahwa secara parsial peningkatan pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas PUPR Kabupaten Batola. Juga diharapkan dapat mengambil sampel dari pihak eksternal dijadikan sebagai responden khususnya pada variabel peningkatan pelayanan publik agar dapat memberikan gambaran mengenai hasil penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N. (2017). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing.
- Asrini. (2017). Pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja skpd di pemerintah daerah kota palu. *E Jurnal Katalogis*, 5, 52–58.
- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia* (Edisi Pertama). Yogyakarta: BPFE
- Djiloy, N. L. (2016). Pengaruh pengawasan intern, perencanaan, dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja skpd pemerintah daerah kabupaten sigi. *E Jurnal Katalogis, Volume 4*, 70–82.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Usaha Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Usaha Diponegoro.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (ed Pertama). Bandung: Salemba Empat.
- Hartini, E., Fungsional, P., Rangka, D., dan Kerja, O. (2013). *Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Optimalisasi Kerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat Endang Hartini Abstrak. Vol.1*, 40–60.
- Harvianda, Y. P., Surya, R. A. S., & Azlina, N. (2014). *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau ABSTRAKS. 1*(2), 1–15.
- Hendi, H., Irawati, I., & Candradewini, C. (2019). Pengaruh Perencanaan Kinerja Terhadap Kinerja. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(2), 87–99.
- Jensen, M. (1976). The Theory of The Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics*, 3:305-306.
- Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *Fiat Justisia*, 10(3), 569–586. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* 26. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara, A. A. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mehta, C. R., dan Patel, N. R. (2011). *IBM SPSS Exact Test*.
- Meme, M. E., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Pengawasan Fungsional, Transparansi, Akuntabilitas Dan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Volume 8*.
- Mete, D. D., dan Amanah, L. (2020). Pengaruh pengawasan fungsional, transparansi publik, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol 9 No 1*.
- Moenir, H. A. (2008). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustopadidjaja. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. LAN dan Duta Pertiwi.

- Novatiani, A., Kusumah, R. W. R., Vabiani, D. P., Pascasarjana, S., & Widyatama, U. (2019). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*. 10(1), 51–61.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Putra, N., Sari, T. A., dan Erlina. (2016). *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Pada Provinsi Sumatera Utara*. 15(4), 166–174.
- Putra, W. E. (2018). Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik Dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(2), 181. <https://doi.org/10.29040/jap.v18i2.143>
- Sadjiarto, A. (2014). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. *Univ. Kristen Petra*.
- Siregar, S. (2013). *Metode Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS* (Edisi Pert). Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Cetakan ke). Jakarta: Kencana.